

**HKBP PADANG PADA MASA KONFLIK KEPEMIMPINAN  
(1992-1998)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata 1 (S1)  
Pada Program Studi Pendidikan Sejarah*



**Martina Navratilova  
2005 / 64978**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL  
PENDIDIKAN SEJARAH  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2013**

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi  
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang**

**HKBP Padang Pada Masa Konflik Kepemimpinan**

**1992-1998**

**Nama : Martina Navratilova**  
**BP / NIM : 2005 / 64978**  
**Jurusan : Sejarah**  
**Program Studi : Pendidikan Sejarah**  
**Fakultas : Ilmu Sosial**

**Padang, 2013**

**Tim Penguji**

- 1. Drs. Etmi Hardi, M.Hum**
- 2. Abdul Salam, S.Ag, M.Hum**
- 3. Drs. Zul Asri, M.Hum**
- 4. Hendra Naldi, SS, M.Hum**
- 5. Wirdanengsih, S.Sos, M.Si**

**Tanda Tangan**



## **ABSTRAK**

**MARTINA NAVRATILOVA. 2005 / 64978 (Skripsi): HKBP Padang Pada Masa Konflik Kepemimpinan (1992-1998).** Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang. 2013.

Penelitian ini mengkaji tentang peristiwa HKBP (1992-1998), fokusnya pada HKBP Padang. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah, (1) Bagaimana situais HKBP di Kota Padang sehingga mengarah kepada konflik kepemimpinan gereja? (2) Bagaimana dampak konflik kepemimpinan HKBP nasional terhadap HKBP Kota Padang Tahun 1992-1998? Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan situasi HKBP Kota Padang sehingga mengarah konflik kepemimpinan gereja dan menjelaskan dampak konflik kepemimpinan HKBP nasional terhadap Kota Padang tahun 1992-1998.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data-data dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder. Selain dokumen seperti catatan pribadi (diary) dan wawancara lisan dengan beberapa tokoh yang terlibat, dan juga dari masyarakat yang menjadi saksi dan korban. Sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku, surat kabar dan majalah yang tentunya relevan dengan penelitian ini.

Situasi HKBP Nasional yang berimbas ke HKBP Padang menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi warga HKBP Padang. Konflik yang melanda HKBP Padang menyebabkan kondisi sosial warga sangat sulit. Dari penelitian ini, penulis memperoleh suatu kesimpulan, HKBP Padang merupakan imbas dari konflik kepemimpinan di tingkat nasional. Dari kegagalan Sinode Godang, pengangkatan Pejabat Ephorus oleh pemerintah, sampai mutasi yang dilakukan oleh PWT Simanjuntak ke daerah-daerah termasuk ke HKBP Padang. Serta kebijakan HKBP Padang dalam menentukan sikap menimbulkan warga HKBP menjadi pro dan kontra. Sehingga banyak warga yang menjadi korban dan menderita karena konflik tersebut.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugrah yang diberikan baik nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga karya kecil ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Subyektif penulis mengangkat HKBP Padang Pada Masa Konflik Kepemimpinan (1992-1998) menjadi skripsi yang merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab moral sebagai jemaat yang lahir dan hidup di HKBP Padang. mencoba mengurai dan merangkai fakta-fakta tentang kondisi dan dampak HKBP Padang akibat Konflik Kepemimpinna. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut membantu, baik berupa sarana, motivasi, materi dan doa.

1. Bapak Drs. Etmi Hardi, M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Bapak Abdul Salam, S.Ag, M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Tim pembahas dan penguji Drs. Zul Asri, M. Hum, Hendra Naldi, SS, M.Hum, dan Wirdanengsih, S.Sos, M.Si yang banyak meluangkan waktunya menghadiri serta memberikan masukan pada waktu sidang skripsi

3. Kepada Bapak / Ibu narasumber yang dengan senang hati diganggu aktivitasnya, untuk memberikan data-data dalam cerita yang sangat membantu dalam memberikan sumber primer penulisan skripsi ini.
4. Bapak / Ibu dosen sejarah yang dengan ikhlas mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga tercipta skripsi ini.
5. Bapak / Ibu penatua HKBP Padang beserta staf dan jajarannya yang sangat terbuka memberikan data-data penunjang penelitian.
6. Rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai manusia yang masih harus banyak belajar, penulis menyadari skripsi ini mungkin bukanlah sebuah karya yang sempurna. Harapan penulis semoga para pembaca sudi memberikan kritikan dan saran yang bersifat konstruktif untuk kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. Akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa kita berserah diri, Yang Maha Luas Ilmu-Nya dan Maha Bijaksana.

Padang, 2013

Penulis

Martina Navratilova  
NIM. 64978

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAKS</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM HKBP</b>	
A. Komunitas Kristen .....	17
B. Sejarah Singkat HKBP Nasional (Pusat) .....	21
C. Perpecahan HKBP Nasional (Pusat) .....	27
D. Keterlibatan pemerintah .....	30
<b>BAB III HKBP KOTA PADANG: KONFLIK DAN PENGARUHNYA</b>	
A. Sejarah Lahirnya HKBP di Kota Padang .....	34
B. Dinamika Konflik HKBP Kota Padang	
1. HKBP Padang Menjelang Pecahnya Konflik .....	37
2. HKBP Padang Masa Konflik .....	41
C. HKBP Padang paska Konflik .....	45

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Ringkasan .....	50
B. Simpulan .....	51
C. Saran .....	52

#### **DAFTAR PUSTAKA**

A. Arsip .....	54
B. Buku, Makalah dan Skripsi .....	54
C. Surat Kabar dan Majalah .....	55
D. Wawancara .....	56

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berbagai persoalan ditingkat HKBP nasional (tahun 1980-an) memicu permasalahan di HKBP, semenjak HKBP diperhadapkan pada era industrialisasi dan modernisasi di Indonesia. Memasuki era industrialisasi dan modernisasi, pada tahun 1987 HKBP mengalami permasalahan yang hebat akibat bencana gempa bumi yang mengguncang daerah Tapanuli Utara. Bencana tersebut merupakan ujian berat bagi HKBP. Puluhan ribu masyarakat di daerah Silindung terpaksa hidup di tenda pengungsian karena rumah mereka roboh diguncang gempa bumi.<sup>1</sup> Di tengah-tengah situasi itu, HKBP juga mengalami kerikil yang mengganggu berbagai usaha memperbaiki kehidupan spiritual dan sosial warga jemaatnya.

Pada masa Ephorus (Pimpinan HKBP Indonesia) GHM Siahaan, perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengalami perubahan yang semakin cepat. Sekjen HKBP pada waktu itu, Pdt. FH Sianipar dengan dukungan seorang pengusaha besar dan juga anggota majelis pusat HKBP, TD Pardede berusaha menguasai segala keputusan di dalam tubuh HKBP.<sup>2</sup> Satu pengikut kuat TD Pardede dari jajaran Praeses (Ketua Regional) adalah Pdt. PWT Simanjuntak. Koalisi pengusaha besar TD Pardede dengan sekjen dan sebagian besar anggota majelis pusat dan praeses merupakan pengrongrongan terhadap

---

<sup>1</sup> Pdt. Dr. Jubil Raplan Hutaaruk. 2011. *Sejarah 150 Tahun Huria Kristen Batak Protestan HKBP 7 Oktober 1861 - 7 Oktober 2011*. Pearaja Tarutung: Kantor Pusat HKBP, hal. 331.

<sup>2</sup> Moksa Nadeak, Dkk. 1995. *Krisis HKBP: Ujian Bagi Iman Dan Pengamalan Pancasila*. Tarutung: Biro Informasi HKBP, hal. 35

HKBP sendiri. Akhirnya pada bulan November 1978 Sinode Godang HKBP mengambil keputusan untuk memberhentikan sekjen Pdt. FH Sianipar dan mengangkat Sekjen Baru Pdt. PM Sihombing. TD Pardede diberhentikan sebagai Rektor Universitas HKBP Nommensen, begitu juga PWT. Simanjuntak yang menjabat sebagai praeses distrik Jawa, Kalimantan diberhentikan bahkan dipecat dari seluruh jabatan strukturalnya pada tahun 1979.<sup>3</sup>

Pada tahun 1986 diadakan Sinode Godang di Sipaholon Tarutung untuk memilih fungsionaris baru, dimunculkanlah dua calon untuk dipilih menjadi Ephorus, yaitu Ds. P.M. Sihombing dan Pdt. SAE Nababan. Setelah pemungutan suara, yang terpilih menjadi Ephorus HKBP periode 1987-1992 adalah Pdt. SAE Nababan dan Sekjen adalah Pdt. OPT Simorangkir. Selama periode ini banyak program kerja yang dilaksanakan untuk memajukan HKBP menghadapi era industrialisasi.<sup>4</sup>

Namun sejak pertengahan tahun 1987 mulai muncul konflik internal di HKBP karena pimpinan HKBP merestui Safari Penginjilan Tim Evangelisasi Nehemia (TEN) dari Jakarta ke Tapanuli. Sekelompok kecil pendeta HKBP yang dinamai "*kelompok sebelas*" mengkritisi kehadiran dan cara pelaksanaan ibadah TEN yang dinilai bernuansa "*kharismatik*" yang dianggap berbeda dengan dogma HKBP dan tidak sesuai dengan liturgi yang dijalankan oleh HKBP. Penilaian tersebut disebarluaskan melalui buku yang mereka terbitkan dengan judul Quo Vadis HKBP. Isi buku dianggap terlalu menyalahkan pimpinan HKBP sehingga dibicarakan dalam rapat majelis pusat HKBP tanggal 24-26 Oktober 1988 dan

---

<sup>3</sup> *Ibid...Hal. 36*

<sup>4</sup> Pdt. Dr. Jubil Raplan Hutauruk. 2011. *Sejarah 150 Tahun Huria Kristen Batak Protestan HKBP 7 Oktober 1861 - 7 Oktober 2011*. Pearaja Tarutung: Kantor Pusat HKBP, hal. 332.

Sinode Godang HKBP tanggal 10-15 November 1988. Hasil Sinode Godang memberi sanksi terhadap "*kelompok sebelas*" dengan memberhentikan mereka dari jabatan pendeta. Kendati demikian, kemelut HKBP tidak berhenti sebab mereka yang dikenakan sanksi tersebut membentuk satu forum yang dinamai "*forum kemurnian HKBP*".<sup>5</sup>

Kemudian, keterlibatan penguasa dalam mencampuri masalah intern HKBP mulai terlihat secara nyata dari gerakan yang dimotori oleh Jenderal (Purnawirawan) Maraden Panggabean yang menjabat sebagai ketua DPA RI. Atas dasar memo Menteri Agama RI, nomor MA/132/1990 tertanggal 6 september 1990, Maraden Panggabean membentuk "*tim damai*" untuk menyelesaikan masalah HKBP. Kehadiran tim itu, semakin mempertajam permasalahan dalam tubuh HKBP karena jelas memunculkan polarisasi antara yang menyambut kehadirannya secara terbuka dengan menolaknya.<sup>6</sup>

Dari tanggal 23-28 November 1992, HKBP direncanakan memilih pimpinan baru. Namun, pemilihan Ephorus (Pimpinan) dan Sekjen (Sekretaris Jendral) tidak berlangsung kondusif sehingga menemui jalan buntu dan mengakibatkan kegagalan Sinode Godang HKBP dalam memilih pimpinan baru. Konflik ini sangat intens dan banyak memakan korban. Sehingga pemerintah memerintahkan Kodam I Bukit Barisan yang Panglimanya Mayjen Pramono selaku ketua Bakorstanasda dengan keputusan No.Skep/3/Stada/XII/1992 tanggal 23 Desember 1992 dengan menunjuk Pdt. PWT Simanjuntak sebagai Pejabat Ephorus dengan tugas melakukan sinode godang istimewa. *Kelompok Setia*

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Moksas Nadeak, Dkk. 1995. *Krisis HKBP: Ujian Bagi Iman Dan Pengamalan Pancasila*. Tarutung: Biro Informasi HKBP, hal. 69.

*Sampai Akhir* tidak mengakui keputusan SAI di Hotel Tiara, sehingga HKBP terbagi dua dengan memiliki dua ephorus yaitu Pdt. SAE Nababan yang dipilih secara sah tanpa campur tangan dan Pdt. PWT Simanjuntak yang dipilih oleh SAI Tiara dengan dukungan pemerintah dan militer.<sup>7</sup>

Sejak saat itulah muncul dua kelompok yang berbeda sikap dan pandangan dikalangan *pendeta, guru jemaat, bibelvrouw, diakones, sintua* dan warga HKBP. Pertama, kelompok yang menamakan diri sebagai Pro Aturan-Peraturan HKBP. Kedua, kelompok yang Pro Sinode Godang Istimewa 11-13 februari 1993, sama-sama mengklaim diri sebagai HKBP yang benar dan berjalan sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP. Konflik ini tidak hanya terjadi di daerah Tapanuli Utara, tetapi juga merembes ke daerah lainnya termasuk Padang. Di daerah Padang kedua kelompok ini terlibat dalam suasana saling menyalahkan, dan lebih memprihatinkan banyak jatuh korban jiwa, material atau harta benda dari masing-masing kelompok tersebut.<sup>8</sup>

Sekitar 70 orang warga HKBP dari Tarutung menyerang gereja HKBP Padang di jalan Hayam Wuruk pukul 05.30 pagi. Dalam penyerangan itu, kelompok HKBP Medan berusaha menculik Pdt. Badia H Panjaitan pimpinan gereja HKBP Padang. Usaha ini menyebabkan terjadinya bentrokan dengan para jemaat dukungan Panjaitan. Akibatnya, dua pendeta dan enam orang warga HKBP Padang mengalami luka-luka.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak. 2011. *Pemikiran Tentang Batak Setelah 150 Tahun Agama Kristen di Sumatera Utara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, halxxi.

<sup>8</sup> Pdt. Dr. Jubil Raplan Hutaaruk. 2011. *Sejarah 150 Tahun Huria Kristen Batak Protestan HKBP 7 Oktober 1861 - 7 Oktober 2011*. Pearaja Tarutung: Kantor Pusat HKBP, hal. 333.

<sup>9</sup> Singgalang. 4 November 1995. *Gereja HKBP Padang Diserang*.

Pada hari Minggu tanggal 12 November 1995 HKBP Padang kembali diserang. Drama penyerbuan yang berlangsung usai kebaktian mengundang bentrok fisik, perang batu dan saling kejar antara pihak penyerang dengan jemaat HKBP Padang. Akibat aksi kekerasan selama 20 menit itu menyebabkan dua jemaat terluka, satu mobil rusak berat dan kaca-kaca jendela sebuah rumah terletak dekat gereja berantakkan.<sup>10</sup>

Masalah ini perlu dibahas dan diteliti secara objektif. Obyektifitas membutuhkan semangat ilmiah, dimana semangat ini merekonstruksi sejarah sangat dibutuhkan. Disamping itu sejarah tidak bermaksud untuk menghakimi para pelaku, situasi dan tulisannya. Bahkan penulis sejarah tidak perlu membuktikan sesuatu, sebagaimana yang ditulis Mestika Zed, penulis sejarah yang baik, tidak berusaha untuk membuktikan sesuatu, melainkan merekonstruksi bagaimana sesuatu itu terjadi atas dasar bukti-bukti yang dipelajari.<sup>11</sup>

Penulis berasumsi bahwa penelitian ini sangat menarik dan penting untuk diteliti dalam kajian sejarah. *Pertama*, selama ini penulisan Konflik Kepemimpinan HKBP cenderung bersifat makro sehingga kajian sejarah lokal khususnya Padang belum ada. *Kedua*, walaupun HKBP Padang dipaksa untuk memihak kepada kepemimpinan PWT Simanjuntak tetapi jemaat HKBP padang tetap memilih untuk tidak memihak kemanapun atau status quo.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk menguak tabir gelap tersebut, bagaimana terjadinya konflik kepemimpinan, melihat orientasi dampak konflik kepemimpinan tubuh HKBP terhadap jemaat HKBP

---

<sup>10</sup> Singgalang. *13 November 1995. Lagi, Gereja HKBP Padang Diserang*.

<sup>11</sup> Mestika Zed. 2003. *Metodologi Sejarah*. Padang: FIS-UNP, hal. 7.

kota Padang, mengungkap timbulnya perpecahan dalam tubuh HKBP sehingga muncul konflik kepemimpinan nasional yang memberi dampak terhadap HKBP Padang. Dengan mengangkat permasalahan tersebut kedalam tulisan dengan judul *HKBP Padang Pada Masa Konflik Kepemimpinan Pada Tahun 1992-1998*.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Tulisan ini membahas tentang HKBP Padang Pada Masa Konflik Kepemimpinan Tahun 1992-1998, mengingat keterbatasan kemampuan waktu yang dimiliki dan agar penulisan skripsi tidak mengambang maka penulis memberikan batasan. Batasan spasialnya adalah HKBP Kota Padang dan batasan temporalnya tahun 1992-1998. Tahun 1992 sebagai batas awal, terutama sejak kegagalan Sinode Godang dalam memilih pimpinan baru. Tahun 1998 sebagai batasan akhir, setelah dikeluarkannya pernyataan bersama dengan mengakui keberadaan masing-masing pihak tanpa syarat, antara lain pemberlakuan Aturan dan Peraturan HKBP (1982-1992 dan 1994-2004) dalam memasuki Sinode Godang 18-20 Desember 1998. Serta mengidentifikasi situasi yang mempengaruhi HKBP Padang Pada Masa Konflik Kepemimpinan Tahun 1992-1998. Ruang lingkup penulisan ini mencakup proses terjadinya konflik, mengungkap perpecahan dalam tubuh HKBP sehingga muncul konflik kepemimpinan serta dampak konflik kepemimpinan terhadap jemaat kota Padang. Untuk membatasi ruang lingkup dan memudahkan penelitian ini maka diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana situasi HKBP di Kota Padang sehingga mengarah pada konflik kepemimpinan gereja?
2. Bagaimana dampak konflik kepemimpinan HKBP Nasional terhadap HKBP Kota Padang tahun 1992-1998 ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan HKBP Padang Pada Masa Konflik Kepemimpinan Tahun 1992-1998.

#### **1. Tujuan**

- a. Menggambarkan situasi HKBP Kota Padang sehingga mengarah pada konflik kepemimpinan gereja.
- b. Menjelaskan dampak Konflik kepemimpinan HKBP Nasional terhadap HKBP Kota Padang tahun 1992-1998.

#### **2. Manfaat**

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat menambah khasanah sejarah lokal, khususnya mengenai sejarah lembaga keagamaan dengan mempelajari HKBP.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepemimpinan.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Studi Relevan**

Penulisan tentang HKBP secara umum telah banyak dilakukan oleh para pendeta atau penulis lain. Mengingat begitu banyaknya kajian relevan yang berbicara tentang HKBP, maka untuk kepentingan penulisan hanya beberapa saja yang dapat diuraikan. Jubil Raplan Hutauruk, dalam bukunya *Sejarah 150 Tahun HKBP 7 Oktober 1861- 7 Oktober 2011*, mendeskripsikan perjalanan HKBP dari awal sampai 2011.

Literatur lainnya adalah biro informasi HKBP yang berjudul *Krisis HKBP Ujian Bagi Iman Dan Pengamalan Pancasila (1995)*. Literatur ini membahas tentang akar masalah HKBP yang memuat kejadian demi kejadian yang dialami warga HKBP. Dari banyak literatur tentang HKBP, buku ini yang paling banyak melihat HKBP pada masa konflik kepemimpinan. Bungaran Antonius Simanjuntak dalam *Pemikiran Tentang Batak Setelah 150 Tahun Agama Kristen di Sumatera Utara*. membahas tentang pemikiran para pemikir batak, seperti Dr. Dewi Sri menyajikan dengan gamblang fakta-fakta pelanggaran teologis yang dilakukan pendeta generasi sekarang.

Skripsi yang menjadi acuan penulis yakni skripsi yang ditulis oleh Rina Rizki tahun 2000 yang mengkaji *Sekitar Dualisme Kepemimpinan Nasional Indonesia: Soekarno dan Soeharto Dalam Masa Transisi 1966-1967*. Skripsi ini mendeskripsikan situasi politik pasca G 30 S PKI, kebijakan yang diambil Presiden Soekarno dan Soeharto sebagai pengembalian Supersemar, dan menjelaskan proses berakhirnya dualisme kepemimpinan Indonesia 1966-1967.

mendeskripsikan situasi politik pasca G 30 S PKI, kebijakan yang diambil Presiden Soekarno dan Soeharto sebagai pengembalian Supersemar, dan menjelaskan proses berakhirnya dualisme kepemimpinan Indonesia 1966-1967.

Sedangkan Ani Samaloisa dalam skripsinya *Proses Masuk dan Berkembangnya Agama Kristen Protestan di Pagai Utara Selatan Kepulauan Mentawai Tahun 1901-1916*. Dalam skripsi ini menjelaskan proses awal masuk agama Kristen yang dibawa oleh Misionaris Jerman.

Semua karya dari para pendeta dan penulis tersebut, sangat membantu menunjang dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, walaupun kajian khususnya berbeda. Disini penulis lebih menitik beratkan HKBP Padang pada Masa Konflik Kepemimpinan Tahun 1992-1998.

## **2. Kerangka Konseptual**

Untuk memperjelas arah penelitian ini, ada beberapa konsep yang harus dijabarkan yaitu: konsep HKBP, konflik, kepemimpinan. Pertama, konsep HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), Moxa Nadeak dkk menyatakan bahwa "Huria diartikan sebagai gereja atau bisa juga dimengerti sebagai jemaat." Sedangkan kata Batak menjadi salah satu identitas dari HKBP sendiri.

Namun, di dalam Tata Gereja (HKBP memakai istilah Aturan untuk Anggaran Dasar dan Peraturan untuk Anggaran Rumah Tangga) HKBP pasal 1 (Aturan) disebutkan bahwa HKBP adalah wadah persekutuan dari orang yang berasal dari segala kelompok, kalangan dan suku bangsa yang berada diseluruh

Indonesia, serta diseluruh dunia ini, yang dibabtiskan kedalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus.

Menurut Nugroho Notosusanto, konflik kepemimpinan terjadi karena ada dua asas kekuatan yang bertentangan atau sifat mendua.<sup>12</sup> Konflik kepemimpinan terjadi karena adanya dua kekuatan utama yang sangat berperan, yaitu Pdt. SAE Nababan dan Pdt. PWT Simanjuntak. Berbicara tentang organisasi tidak akan terlepas dari kepemimpinan. Menurut Soejono Soekanto kepemimpinan adalah kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain itu bertingkah sebagaimana dikehendaki oleh pimpinan tersebut. Pemimpin berfungsi untuk mengambil keputusan, memotivasi anak buah, sebagai sumber informasi, menciptakan inspirasi, menciptakan keadilan, sebagai katalisator, sebagai wakil organisasi, menyelesaikan konflik, dan memberikan sugesti pada bawahan. Fungsi tersebut harus selalu dilakukan untuk dapat menciptakan tertib sosial pada orang yang dipimpinya. Berkurangnya salah satu fungsi akan mempengaruhi kualitas kepemimpinan seseorang. Dalam kepemimpinan sendiri dikenal berbagai gaya kepemimpinan, yakni gaya kepemimpinan otoriter, kepemimpinan bebas, dan demokratis. Pemimpin jemaat, seperti ulama, kiyai, khalifah, pendeta dipatuhi karena kharismanya. Maka ciri khas dari organisasi keagamaan ini adalah adanya pengikut yang setia dan pimpinan kharismatik yang dipatuhi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 145.

<sup>13</sup> Bustanuddin Agus. 2003. *Sosiologi Agama*. Padang: Andalas University Press, hal. 113.

Organisasi juga tidak terlepas dari kata-kata yang berkaitan dengan pemerintahan itu sendiri seperti kekuasaan, wewenang, dan legitimasi. Menurut Laswell dan Kaplan, kekuasaan adalah proses untuk mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan orang lain dengan sanksi yang berat (yang benar-benar dilaksanakan atau berupa ancaman) jika mereka tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang dimaksud.<sup>14</sup> R.J.Mokken, mengartikan bahwa kekuasaan adalah kemampuan dari pelaku untuk menetapkan secara mutlak atau mengubah (seluruhnya atau sebagian) alternatif-alternatif bertindak atau alternatif memilih, yang tersedia bagi pelaku-pelaku lain.<sup>15</sup> Menurut Deutsch, kekuasaan adalah kemampuan seseorang individu atau suatu organisasi untuk memaksakan perhitungan atau proyeksi struktur dalamnya pada lingkungan.<sup>16</sup> Kekuasaan tidak pernah dimiliki individual, kekuasaan merupakan milik sebuah kelompok. Keberadaannya akan tetap ada selama kelompok tersebut selalu bersama. Ketika seseorang dianggap berkuasa, sesungguhnya muncul karena mewakili orang-orang yang sepakat untuk mendukungnya.<sup>17</sup> Konsep lain yang erat kaitannya dengan kekuasaan adalah wewenang (*authority*) dan legitimasi. Wewenang berarti kekuasaan yang dilembagakan, sedangkan legitimasi (keabsahan) adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Miriam Budiardjo. 1991. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 19.

<sup>15</sup> *Ibid.*... Hal. 18.

<sup>16</sup> Roderick Martin. 1993. *Sosiologi Kekuasaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 34.

<sup>17</sup> R.D.Pitaloka. 2004. *Kekuasaan Negara Menular ke Masyarakat*. Yogyakarta: Galang Press.

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo; Op. Cit., Hal. 15.

Adanya pertentangan dan konflik pada tatanan nasional membawa imbas terhadap masyarakat tingkat lokal, maka untuk penulisan sejarah tentang HKBP Padang Pada Masa Konflik Kepemimpinan Tahun 1992-1998 dipakai teori konflik. Teori konflik dikembangkan pertama kali oleh Karl Marx, untuk mengkaji tentang pertentangan kelas di dalam masyarakat industri. Ide pertentangan menurut Marx adalah pertentangan kelas sebagai satu bentuk dan sebagai sumber perubahan sosial.<sup>19</sup> Menurut Dean G. Pruitt (1986), konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*). Kepentingan adalah perasaan individu yang mengenai apa yang diinginkan, bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan individu yang akan membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan intensitas. Konflik akan muncul bila mereka mengidentifikasi diri sebagai kelompok terpisah dari kelompok lain.<sup>20</sup>

Kemudian teori konflik Marx ini dikembangkan oleh para ahli sosiologi lainnya seperti Ralf Dahrendorf, "Integritas dan nilai-nilai versus penggunaan kekerasan dan kepentingan-kepentingan: dua gambaran tentang masyarakat". Teori penggunaan kekuasaan tentang masyarakat, terdapat dalam asumsi-asumsi Dahrendorf yaitu:

" Setiap masyarakat dalam setiap hal tunduk kepada proses perubahan; perubahan sosial terdapat dimana-mana. Setiap masyarakat dalam setiap hal memperlihatkan pertikaian dan pertentangan; pertentangan sosial terdapat dimana-mana. Setiap unsur dalam masyarakat memberikan kontribusi terhadap perpecahan dan perubahannya. Setiap masyarakat

---

<sup>19</sup> Margaret M. Poloma. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 135

<sup>20</sup> Dean G Pruitt. 1986. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 21.

didasarkan atas penggunaan kekuasaan oleh sejumlah anggotanya terhadap anggotanya yang lain.<sup>21</sup>

Kekuasaan selalu terdapat dalam negara maupun masyarakat. Negara dapat diumpamakan sebagai sebuah organisasi sosial yang ditandai dengan adanya hubungan antara yang dikuasai dengan menguasai, struktur kekuasaan dan kepentingan yang kadang kala bertabrakan sehingga menjurus kepada konflik. Dalam hal ini Dahrendorf kembali menilai bahwa dalam suatu kehidupan sosial disamping terdapat konsensus yang memperkokoh integrasi juga terdapat konflik. Berikut ini adalah citra atau image tentang organisasi sosial Dahrendorf Yaitu:

” Sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan konflik. Konflik tersebut disebabkan adanya kepentingan-kepentingan yang bertentangan yang tidak dapat dicegah dalam struktur sosial masyarakat. Kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan mencerminkan diferensiasi distribusi kekuasaan diantara kelompok-kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Kepentingan itu cenderung berpolarisasi dalam dua kelompok yang saling bertentangan yang dalam kondisi-kodisi tertentu menimbulkan konflik. Perubahan sosial merupakan ciri sistem-sistem sosial dan merupakan akibat-akibat konflik yang tidak dapat dicegah pada pelbagai tipe pola-pola yang telah melembaga.<sup>22</sup>

Masyarakat yang bertentangan akan memanfaatkan kesempatan dan kekuasaan untuk menghancurkan lawan, karena ikatan dan tata kelakuan yang berlaku di masyarakat didasarkan pada kekuasaan yang berlaku. Mereka yang berkuasa akan mendominasi, memaksa dan menundukkan pihak lain. Respon masyarakat pun akan cenderung berubah tergantung siapa yang berkuasa dan kepentingan pribadi yang dimiliki.<sup>23</sup>

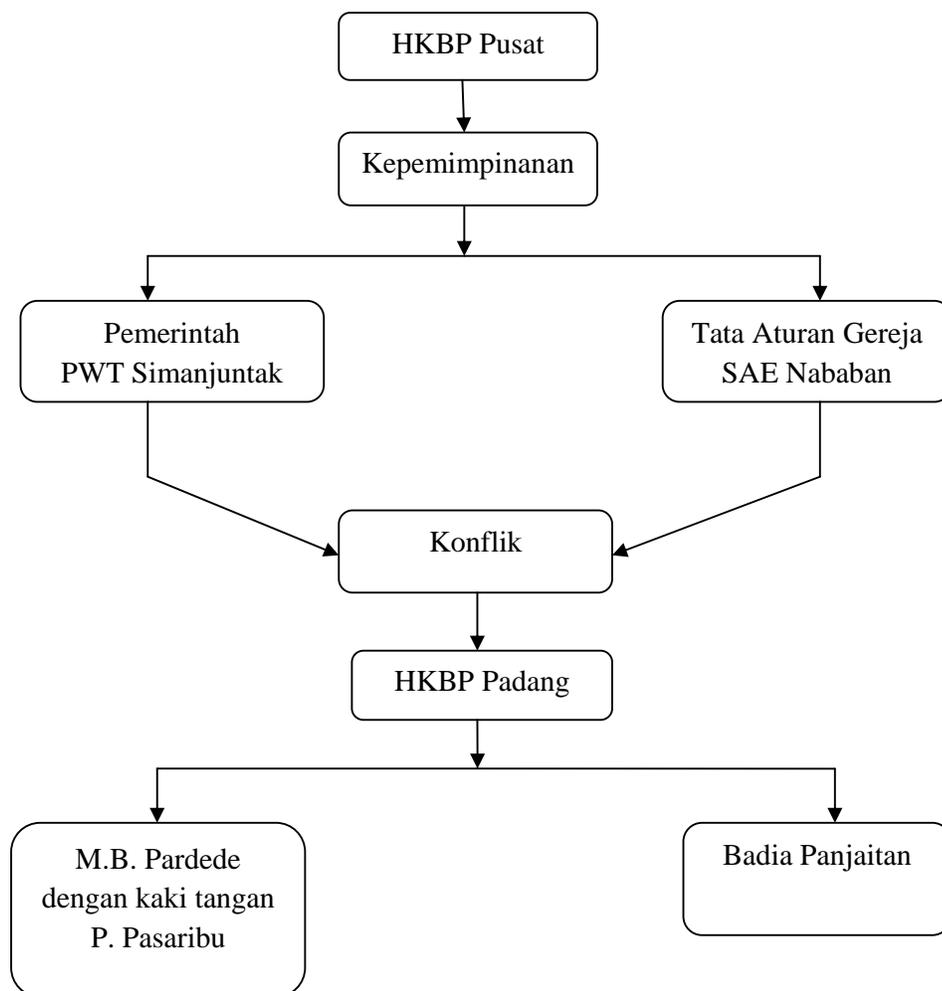
---

<sup>21</sup> Ralf Dahrendorf. 1959. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri; Sebuah Analisa Kritik*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 191-198.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Doyle Paul Jhonson. *Teori Sosiologi Politik Klasik dan Modern, Jilid II*. Jakarta : Gramedia.

Masa konflik kepemimpinan HKBP, khususnya jemaat HKBP Padang merupakan periode sejarah yang penuh krisis dan intrik, perpecahan dan saling curiga-mencurigai sehingga menimbulkan goncangan serta benturan-benturan dalam kehidupan jemaat baik fisik maupun mental, akibatnya terjadi konflik saudara sesama jemaat HKBP.



## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian HKBP Padang Pada Masa Konflik Kepemimpinan tahun 1992-1998 digunakan metode penelitian sejarah, yang melalui beberapa tahap. Langkah-langkah dalam metode sejarah itu adalah heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (penulisan).<sup>24</sup>

*Heuristik*, yaitu mencari dan menemukan data atau sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan konflik kepemimpinan HKBP. Dalam metode sejarah semua bukti-bukti (evidence), peninggalan masa lampau, baik berupa sumber benda, dokumen, maupun sumber lisan disebut sebagai sumber sejarah. Sumber-sumber dapat dikategorikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder.<sup>25</sup> Sumber primer yang penulis pakai adalah berupa dokumen dan arsip-arsip yang diperoleh dari jemaat HKBP Padang dan sumber lisan melalui wawancara dengan tokoh-tokoh HKBP di Kota Padang. penulis juga menggunakan skripsi yang menyinggung tentang konflik kepemimpinan, serta sumber-sumber dari sumber sekunder yang diperoleh dalam bentuk buku-buku, makalah, jurnal, koran, internet. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan di perpustakaan HKBP, Perpustakaan FIS UNP, Perpustakaan Jurusan Sejarah FIS UNP.

Tahap kedua adalah *kritik sumber*, baik kritik eksternal yaitu pengujian otentisitas (keaslian) materialnya dan internal untuk menguji kesahihan (reabilitas) isi informasi sejarah yang terkandung didalamnya.<sup>26</sup> Untuk sumber yang bersifat

---

<sup>24</sup> Louis Gottchalk. 1958. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 56.

<sup>25</sup> Mestika Zed. 2003. *Metodologi Sejarah*. Padang: FIS-UNP, hal. 37.

<sup>26</sup> *Ibid.*

tekstual seperti dokumen, koran, majalah maupun buku-buku yang relevan dalam penulisan, penulis melakukan kritik ekstern yang menyeleksi bacaan yang penulis pakai dan kritik intern dengan pengujian terhadap sumber data yang telah terkumpul untuk menetapkan kredibilitas dan validitasnya.

Tahap selanjutnya adalah analisa *sintesis dan interpretasi* yaitu memilih dan memilah sumber sejarah sehingga ditemukan informasi-informasi yang sebenarnya atau sudah diuji lewat saringan kritik sumber.

Tahap terakhir adalah penulisan sejarah (historiografi) yaitu usaha untuk mendeskripsikan hasil penelitian dalam sebuah karya ilmiah sejarah khususnya tentang Konflik Kepemimpinan HKBP terhadap jemaat HKBP Padang.